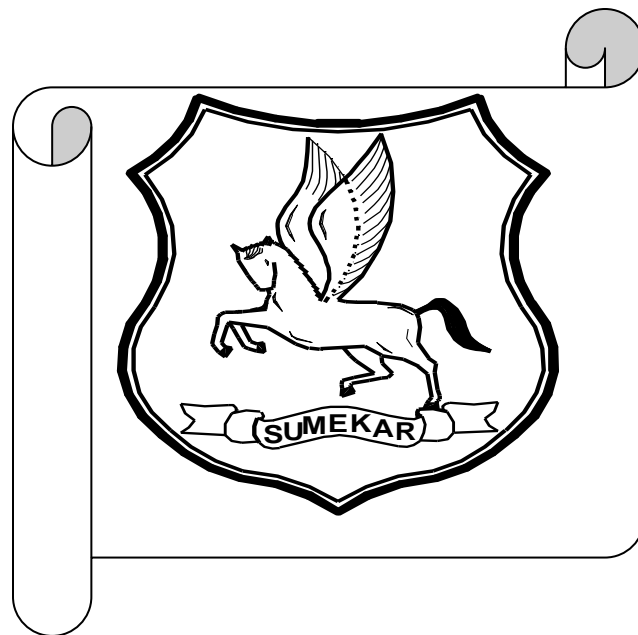


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2016 – 2021, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2022.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022.

Sumenep, 15 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DIDIK WAHYUDI M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670205 198812 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	94
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	97
	2.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat	114
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	122
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	122
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	122
	3.3. Program dan Kegiatan	125
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	140
BAB V	PENUTUP	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2020	10
Tabel 2.2	Belanja Langsung TA.2020	11
Tabel 2.3	Realisasi Program dan Kegiatan	16
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sumenep	35
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep	71
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sumenep	98
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Sumenep	114
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA	123
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sumenep	126
Tabel 4.1	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketanagakerjaan
26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
28. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut ::

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (Tahun 2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

- a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun 2020. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Promosi dan Kerjasama Investasi
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan
6. Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7. Program Pelayanan Administrasi Perizinan

terdiri dari 7 (tujuh) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan 14 (empat belas) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 185,94% (per 31 Desember 2020).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4. Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
8. Program Pelatihan Keterampilan Kerja.

terdiri dari 8 (delapan) program, 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2020, sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebesar **Rp. 7.833.111.604,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 7.031.748.849,- (89,77%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2020

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2020	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.833.111.604	7.031.748.849	89,77
	BELANJA PEGAWAI	7.833.111.604	7.031.748.849	89,77
I	Gaji dan Tunjangan	5.108.920.691	4.570.732.797	89,47
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.001.033.027	3.590.474.232	89,74
2	Tunjangan Keluarga	406.511.846	361.663.602	88,97
3	Tunjangan Jabatan	338.601.200	320.110.000	94,54
4	Tunjangan Fungsional Umum	129.996.400	103.495.000	79,61
5	Tunjangan Beras	219.826.565	182.425.980	82,99
6	Tunjangan PPh	12.880.975	12.521.841	97,21
7	Pembulatan Gaji	70.678	42.142	59,63
II	Tambahan Penghasilan PNS	2.724.190.913	2.461.016.052	90,34

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2020	Realisasi Keuangan SPJ	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	222.000.000	222.000.000	100,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja	2.502.190.913	2.239.016.052	89,48
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.833.111.604	7.031.748.849	89,77

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 5 Program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.116.975.168,-** realisasi belanja **Rp. 1.065.810.680,- (95,42%)**
2. Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 6 (enam) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.864.996.939,-** realisasi belanja **Rp. 1.566.934.017,- (84,02%)**
3. Urusan Administrasi terdiri dari 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.237.318.963,-** realisasi belanja **Rp. 1.092.822.580,- (88,32%)**.

Dari ke 3 komponen diatas bahwa total pagu Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.219.291.070,-** realisasi belanja **Rp. 3.725.567.877,- (88,30%)** dengan perincian berikut ini.

Tabel 2.2
Belanja Langsung TA. 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	4.219.291.070	3.725.567.877	88,30
I	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.226.848.363	1.085.352.580	88,47
I.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.706.400	3.656.400	98,65
I.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.055.055	159.983.647	72,70
I.3	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	75.855.775	74.763.760	98,56
I.4	Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	35.685.798	34.465.480	96,58

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.937.000	6.437.500	92,80
I.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.480.000	26.813.000	80,09
I.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.885.000	17.872.500	99,93
I.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	137.630.000	112.125.327	81,47
I.9	Peringatan Hari-Hari Besar	0	0	0,00
I.10	Operasional UPTD	112.473.200	105.527.100	93,82
I.11	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	196.120.000	195.900.400	99,89
I.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	183.335.500	182.095.500	99,32
I.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	76.182.635	55.446.645	72,78
I.14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	106.534.000	90.387.321	84,84
I.15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	20.968.000	19.878.000	94,80
II	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.470.600	7.470.600	71,35
II.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.470.600	7.470.600	71,35
II.1.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4.366.400	2.866.400	65,65
II.1.2	Penyusunan Laporan Keuangan	934.500	1.184.500	126,75
II.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.169.700	3.419.700	66,15
	URUSAN PENANAMAN MODAL	1.116.975.168	1.065.810.680	95,42
III	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	190.169.000	189.200.480	99,49
III.1	Promosi Potensi Investasi Daerah	190.169.000	189.200.480	99,49
III.1.1	Promosi Publikasi Potensi Investasi	190.169.000	189.200.480	99,49
IV.	Program Pengembangan Data/Informasi	45.813.000	45.520.100	99,36
IV.1	Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep Terpadu	45.813.000	45.520.100	99,36
IV.1.1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	26.853.000	26.666.100	99,30
IV.1.2	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	18.960.000	18.854.000	99,44
V	Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	105.068.345	104.130.300	99,11
V.1	Sosialisasi Perizinan	16.657.145	16.651.000	99,96
V.1.1	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.707.145	11.701.000	99,95

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
V.1.2	Sosialisasi Perizinan	4.950.000	4.950.000	100,00
V.2	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	35.496.700	35.496.700	100,00
V.2.1	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	35.496.700	35.496.700	100,00
V.3	PENATAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN	52.914.500	51.982.600	98,24
VI	Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	65.084.300	64.929.300	99,76
VI.1	Akselerasi Pertumbuhan Investasi	4.927.900	4.927.900	100,00
VI.2	Pembinaan dan Evaluasi PMDN	17.066.750	16.986.750	99,53
VI.2.1	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	17.066.750	16.986.750	99,53
VI.3	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	43.089.650	43.014.650	99,83
VI.3.1	Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	43.089.650	43.014.650	99,83
VII.	Program Pelayanan Administrasi Perizinan	710.840.523	662.030.500	93,13
VII.1	Pelayanan Permohonan pendaftaran Perizinan	645.309.833	596.651.810	92,46
VII.1.1	Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan	36.955.800	32.533.948	88,03
VII.1.2	Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan	8.793.033	7.955.397	90,47
VII.1.3	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Perizinan	559.561.000	519.866.465	92,91
VII.1.4	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008	40.000.000	36.296.000	90,74
VII.2	Pelayanan Penerbitan Perizinan	65.530.690	65.378.690	99,77
VII.2.1	Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan	34.262.190	34.232.190	99,91
VII.2.2	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.268.500	31.146.500	99,61
	URUSAN KETENAGAKERJAAN	1.864.996.939	1.566.934.017	84,02
I	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	117.934.187	115.281.034	97,75
1	Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	65.358.187	64.323.009	98,42
2	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di Deportasi	20.151.000	18.688.825	92,74
3	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	32.425.000	32.269.200	99,52
II	Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	61.673.200	18.358.990	29,77
1	Pemberangkatan Calon transmigran dan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)	61.673.200	18.358.990	29,77
III	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	191.975.000	188.848.400	98,37
1	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga kerja	126.975.000	126.259.000	99,44
2	Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	32.500.000	32.497.400	99,99

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	32.500.000	30.092.000	92,59
IV	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	99.005.500	96.175.500	97,14
1	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	35.965.000	35.965.000	100,00
2	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	33.022.500	30.192.500	91,43
3	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial	30.018.000	30.018.000	100,00
V	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.354.409.052	1.109.943.993	81,95
1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pecah Batu	49.800.000	28.793.000	57,82
2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	100.100.000	100.090.000	99,99
5	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Rias Pengantin	54.800.000	45.262.000	82,59
6	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	45.000.000	44.903.870	99,79
13	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	139.375.700	103.604.300	74,33
17	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Meubelair	139.375.871	126.202.900	90,55
28	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	129.700.000	122.860.354	94,73
31	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	120.150.000	115.780.817	96,36
32	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	372.082.000	296.112.361	79,58
33	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	87.393.500	72.798.500	83,30
34	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	116.631.981	53.535.891	45,90
VI	Program Pelatihan Keterampilan Kerja	40.000.000	38.326.100	95,82
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	40.000.000	38.326.100	95,82

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan

sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran (88,30%).

Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			%	18,38%	18,87%	1.656.988.862,50	1.544.824.400,00		
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	31,00%	30,98%	1,226,848,363	1,085,352,580	Capaian Realisasi Kinerja Program belum terpenuhi karena adanya Capaian Realisasi Kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat belum terpenuhi.	Rasionalisasi jumlah target kinerja Program untuk Tahun yang akan datang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2,988	2,943	3,706,400	3,656,400	Capaian Realsasi Kinerja belum tercapai karena hardware yang mendukung aplikasi simardi mengalami masalah	1. Peremajaan dan reparasi hardware yang mendukung aplikasi simardi
									2. Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	220,055,055	159,983,647		
3	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan kebersihan, jasa kebersihan kantor, serta retribusi kebersihan	Bulan	12	12	75,855,775	74,763,760		
4	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah waktu penyediaan bahan perkantoran berupa ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	35,685,798	34,465,480		
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Komponen	7	7	6,937,000	6,437,500		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan surat kabar/majalah/tabloit dan penghargaan prestasi masyarakat	Bulan	12	12	33,480,000	26,813,000		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Kotak	825	825	17,885,000	17,872,500		
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Tahun	1	1	137,630,000	112,125,327		
9	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0,00	0,00		
10	Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	Macam	15	15	112,473,200	105,527,100		
11	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Orang	16	16	196,120,000	195,900,400		
12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibeli	Unit	0	0	0,00	0,00		
13	Pengadaan peralatan daan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan daan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas yang dibeli	Unit	31	30	183,335,500	182,095,500		
13	Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang direhab	Area	0	0	0,00	0,00		
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Area	1	1	76,182,635	55,446,645		
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	33	32	106,534,000	90,387,321		
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah waktu pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Unit	111	110	20,968,000	19,878,000		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Pengembangan kompetensi pegawai	%	6,11%	6,11%	0	0		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	0	0	0	0		
2	Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepagawaian	Jumlah waktu pengelolaan kepegawaian	Tahun	1	1	0	0		
1	Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	Jenis	3	3	0	0		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	0	0	0	0		
3	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Unit Mesin Absensi	Unit	0	0	0	0		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	0	0	0	0		
3		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	15,83%	15,83%	10,470,600	7,470,600		
	1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Dokumen	12	12	934,500	1,184,500		
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	11	11	9,536,100	6,286,100		
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKJIP, SAKIP	Dokumen	4	4	4,366,400	2,866,400		
	2	Penyusunan RKA dan DPA OPD	Jumlah Dokumen RKA, RPKA, DPA, DPPA	Dokumen	4	4	0	0		
	3	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen RENJA dan Tapkin OPD	Dokumen	2	2	5,169,700	3,419,700		
	4	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah dokumen RENSTRA OPD	Dokumen	0	0	0	0		
	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Scor Tingkat Persepsi Korupsi	Skor	0	0	0	0		
		URUSAN PENANAMAN MDDAL					1,116,975,168	1,065,810,680		
4		Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Investor	6.827	5.754	190,169,000	189,200,480	Capaian Realisasi Kinerja Program Promosi dan Kerjasama Investasi belum terpenuhi	Menyediakan strategi promosi yang perumusannya melibatkan konsultan dan stake holder lainnya.
	1	Promosi potensi investasi daerah	Jumlah Investor Yang Melakukan Investasi	Investor	6.827	5.754	190,169,000	189,200,480	Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Promosi Potensi Investasi Daerah belum terpenuhi	Peningkatan sarana promosi potensi investasi
	1	Promosi Publikasi Potensi Investasi	Jumlah Paket Promosi Potensi Investasi	Paket	1	1	190,169,000	189,200,480	Promosi Publikasi Potensi Investasi kurang maksimal	1. Menyewa papan reklame billboard di area transportasi umum, sentra ekonomi, serta tempat strategis

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									lainnya	
									2. Menyediakan sarana promosi produk unggulan UMKM melalui media masa online.	
									3. Penyediaan ruang outlet visualisasi potensi investasi di kantor DPMPSTSP	
	2	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Potensi Investasi	Kegiatan	0	0	0	0	Pelaksanaan keikutsertaan menjadi peserta pameran hasil produk unggulan tidak terlaksana karena terkendala pandemi covid-19	1. Menjadi bagian dalam pelaksanaan pameran secara virtual yang dilaksanakan pihak lainnya
									2. Penayangan audio visual potensi investasi dan Penyediaan data potensi investasi di lini masa (website atau android)	
	3	Pertemuan dengan Pengusaha/Investor	Jumlah Investor Yang Minat Berinvestasi	Investor	6.827	5.754	0	0	Pertemuan dengan Pengusaha/Investor tidak terlaksana karena terkendala pandemi covid-19	Secara aktif menjadi nara sumber dan peserta dalam acara gathering dan FGD (tatap muka atau webinar) yang dilaksanakan oleh pihak lainnya.
	4	Sumenep Vaganza	Jumlah UMKM Yang Berpartisipasi	UMKM	0	0	0	0		
	5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal	Strategi	0	0	0	0		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
5			Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	Dokumen	7	7	45,813,000	45,520,100	Pengembangan data / informasi perizinan berjalan lambat	1. Pemenuhan sarana berupa hardware dan software komputer dan peralatan lainnya 2. Bekerja sama dengan konsultan dalam usaha digitalisasi sarana layanan perizinan 3. Penempatan data/informasi perizinan di lini masa (website atau android)
	1		Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Peta Investasi dan Perizinan	Dokumen	7	7	45,813,000	45,520,100		
		1	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan Investasi	Dokumen	56	56	18,960,000	18,854,000		
		2	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah Aplikasi SIM Perizinan	Aplikasi	1	1	26,853,000	26,666,100		
		3	Penyusunan Profil Potensi Perizinan Kabupaten	Jumlah Dokumen Profil Potensi Perizinan Kabupaten	Dokumen	0	0	0	0		
6			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	Peraturan PerUU Perizinan	92	92	105,068,345	104,130,300		
	1		Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	Peraturan PerUU Perizinan	92	92	16,657,145	16,651,000		
		1	Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	Peraturan PerUU Perizinan	14	14	4,950,000	4,950,000		
		2	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan	Media Massa	3	3	11,707,145	11,701,000	Penyebaran Informasi Peraturan Perundang-Undangan kurang memadai	1. Penyebaran informasi melalui media massa stasiun radio 2. Penempatan media luar ruang (banner) pada area transportasi umum, sentra-sentra ekonomi dan

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									tempat strategis lainnya	
									3. Penyediaan data peraturan perundang-undangan pada media lini masa (website atau android)	
	3	Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Penyusunan Operating Prosedur (SOP)	Jumlah SPP dan SOP	Dokumen	0	0	0	0		
2		Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi	Lokasi	32	32	35,496,700	35,496,700	Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perizinan kurang maksimal	1. Pembentukan Tim Pengawasan yang melibatkan instansi terkait dan Satpol PP
									2. Keputusan / rekomendasi yang ditetapkan merupakan keputusan kolektif Tim Pengawasan	
									3. Melibatkan OPD Teknis dan mempertimbangkan hasil kajian teknis dalam pengambilan keputusan / rekomendasi	
	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Kegiatan Pengawasan untuk Badan Usaha / Pelaku Usaha yang Mendapatkan Surat Tegoran	Kegiatan	4	4	35,496,700	35,496,700		
	2	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan	Jumlah Kecamatan Pelaksana PATEN Yang Dikunjungi	PATEN	0	0	0	0		
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan kepada Badan Usaha / Pelaku Usaha Dalam Menjalankan Usahanya	Kegiatan	0	0	0	0		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Penataan dan Penertiban Perizinan	Jumlah penanganan perizinan yang tidak sesuai dengan aturan	Kegiatan	5	5	52,914,500	51,982,600	Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Perizinan kurang maksimal	1. Pembentukan Tim Penataan dan Penertiban Perizinan yang melibatkan instansi terkait dan Satpol PP. 2. Keputusan rencana penindakan hukum yang ditetapkan merupakan keputusan kolektif Tim Penataan dan Penertiban Perizinan 3. Melibatkan OPD Teknis dan mempertimbangkan hasil kajian teknis dalam pengambilan keputusan penindakan hukum
7		Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	Rp	Rp 465.381.741.065	Rp 1.948.131.251.836	65,084,300	64,929,300		
	1	Akselerasi Pertumbuhan Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Dalam Negeri	Rp	Rp 465.381.741.065	Rp 1.948.131.251.836	4,927,900	4,927,900		
	2	Pembinaan dan Evaluasi PMDN	Jumlah PMDN Yang Dibina	PMDN	30	30	17,066,750	16,986,750		
	1	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	Jumlah PMDN Yang Dibina	PMDN	30	30	17,066,750	16,986,750	Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha sangat minim	1. Pendampingan pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam memecahkan permasalahan investasi dan usaha pengembangan investasi.
	2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Dokumen RUPM	Dokumen	0	0	0	0		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Penyusunan Road Map RUPM	Jumlah Dokumen Road Map RUPM	Dokumen	0	0	0	0		
	4	Project Prospectus Investasi	Jumlah Poryek Investaasi	Proyek	0	0	0	0		
3		Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip	Izin Prinsip	0	0	43,089,650	43,014,650		
	1	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip	Izin Prinsip	0	0	0	0		
	2	Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Profil Potensi Investasi	Dokumen	0	0	0	0		
	3	Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Obyek	1	1	43,089,650	43,014,650	Data Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep belum menggambarkan potensi investasi secara komprehensif.	1. Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
										2. Data Peluang Potensi Investasi perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan data prospektus potensi investasi.
	4	Penyusunan Profil Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Profil DPM&PTSP	Dokumen	0	0	0	0		
	5	Workshop dan Pendampingan LKPM	Jumlah PMDN Yang Melaksanakan LKPM	PMDN	0	0	0	0		
	6	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERDA/PERBUP Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	PERDA / PERBUP	0	0	0	0		
	7	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kegiatan	0	0	0	0		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13
8		Program Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	4.958	14.893	710,840,523	662,030,500	Mutu Pelayanan Administrasi Perizinan perlu ditingkatkan	1. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP)
										2. Pendampingan kepada pelaku usaha kepulauan dalam proses legalitas usahanya melalui Online Single Submission (OSS)
										3. Pelayanan Perizinan melalui pelayanan bergerak (mobile service)
										4. Peningkatan profesionalisme petugas front/back office pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/struktural
										5. Merevisi SOP dan SPP Pelayanan Perizinan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terbaru
1		Pelayanan Permohonan Pendaftaran Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Berkas	4.958	14.893	645,309,833	596,651,810		
	1	Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Berkas	4.958	14.893	36,955,800	32,533,948		
	2	Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Terlayani Mobil Keliling	Berkas	600	600	8,793,033	7,955,397		
	3	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan perizinan	Jenis	100,00%	100,00%	559,561,000	519,866,465		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	4	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008	Jumlah tahun menyangand sertifikat ISO 9001-2015	Tahun	1	1	40,000,000	36,296,000		
	2	Pelayanan Penerbitan Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	%	100,00%	99,57%	65,530,690	65,378,690	Capaian Realisasi Kinerja kegiatan Pelayanan Penerbitan Perizinan belum terpenuhi karena berkas permohonan perizinan belum lengkap dan benar	Fasilitasi proses pemenuhan berkas permohonan perizinan yang lengkap dan benar
	1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Tenaga Teknis Perizinan dalam Kegiatan Rapat Teknis dan Tinjauan Lapangan	Orang	6	6	31,268,500	31,146,500		
	2	Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	%	100,00%	99,57%	34,262,190	34,232,190	Capaian Realisasi Kinerja sub kegiatan Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan belum terpenuhi karena keterlambatan waktu pemenuhan berkas permohonan perizinan yang lengkap dan benar	1. Fasilitasi percepatan proses pemenuhan berkas permohonan perizinan yang lengkap dan benar
										2. Komunikasi yang intens dengan OPD Teknis terkait dalam proses penerbitan rekomendasi teknis.
	3	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	0	0	0	0		
	4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase Finalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	0,00%	0,00%	0	0		
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Surat Keputusan	0	0	0	0		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		URUSAN KETENAGAKERJAAN					1,864,996,939	1,566,934,017		
	I	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	%			117,934,187	115,281,034		
	1	Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	orang	600	203	65,358,187	64,323,009		
	2	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di Deportasi		orang			20,151,000	18,688,825		
	3	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih/dibina	orang	10	10	32,425,000	32,269,200		
	II	Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Persentase Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	%			61,673,200	18,358,990		
	1	Pemberangkatan Calon transmigran dan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati	KK/KSAD	7	0	61,673,200	18,358,990		
	III	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	%			191,975,000	188,848,400		
	1	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	Kegiatan	32	32	126,975,000	126,259,000		
	2	Pembinaan dan Monitoring Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif	orang	80	55	32,500,000	32,497,400		
	3	Pembinaan Lembaga	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan	LPK	30	30	32,500,000	30,092,000		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelatihan Kerja								
	IV	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	%		99,005,500	96,175,500		
	1	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak	Perusahaan	100	100	35,965,000	35,965,000	
	2	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan	Perusahaan	40	40	33,022,500	30,192,500	
	3	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun	Kasus	5	2	30,018,000	30,018,000	
	V	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	%		1,354,409,052	1,109,943,993		
	1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	1	1	49,800,000	28,793,000	
	2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan	Kelompok	1	1	100,100,000	100,090,000	

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Orang	20	20	54,800,000	45,262,000		
	4	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan	Orang	20	25	45,000,000	44,903,870		
	5	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Orang	25	25	139,375,700	103,604,300		
	6	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Meubelair	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	3	3	139,375,871	126,202,900		
	7	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Peserta Pelatihan yang terdidik	Orang	40	40	129,700,000	122,860,354		

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	8	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Bantuan Peralatan yang diberikan/dihibahkan	Orang	40	40	120,150,000	115,780,817		
	9	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Macam	1	1	372,082,000	296,112,361		
	10	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat					87,393,500	72,798,500		
	11	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat					116,631,981	53,535,891		
	VI	Program Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja				40,000,000	38,326,100		
	1	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan	Orang	25	25	40,000,000	38,326,100		

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melaksanakan 18 (delapan belas) Program, 61 (enam puluh satu) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan , sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran untuk tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 27.971.193.449,00. Diharapkan pada tahun 2021 keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.

- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.

B. Urusan Ketenagakerjaan

- 1. Banyaknya Pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup.
- 2. Lapangan Kerja yang Rendah.
- 3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah.

2. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f) Adanya refocusing sampai 50,00% untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS).
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.

- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

B. Urusan Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan mutu tenaga kerja. dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Memperbaiki sistem pengupahan.
4. Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.
5. Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

7. Mengembangkan Sektor Informal.
8. Program Transmigrasi.
9. Peningkatan Investasi.

2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.
- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel T-C.29 di bawah ini.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Sumenep

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan						
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	100,00	74,22	20,00	33,41	167,05	20,00	127,63	127,63					
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00	55,72	20,00	14,76	73,79	20,00	90,48	90,48			
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat Waktu	100,00	68,46	20,00	20,62	103,10	20,00	109,08	109,08	
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84	48	18	18	100,00	18	84	100,00
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	20	12	4	4	100,00	4	20	100,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	12	4	4	100,00	4	20	100,00
2	18	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek reformasi Birokrasi	79,86	78,94	80,00	89,94	112,43	80,00	82,96	103,88
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100,00	60,00	20,00	20,00	100,00	20,00	100,00	100,00
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	360	216	72	72	100,00	72	360	100,00
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	36	12	12	12	100,00	12	36	100,00
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	31,09	20,00	4,00	20,00	20,00	55,09	55,09
2	18	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Mesin Absensi	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang disediakan	224	73	0	0	0,00	54	127	56,70

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	15	9	3	3	100,00	3	15	100,00
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	50	27	0	0	0,00	10	37	74,00
2	18	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Umum SKPD	100,00	61,9	20,00	17,14	85,70	20	99,04	99,04
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	102	48	20	20	100,00	20	88	86,27
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	182	109	34	34	100,00	34	177	97,25
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3727	1887	925	837	90,49	784	3.508	94,12
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan	3.356	2.766	565	565	100,00	739	4.070	121,28

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	441	270	106	102	96,23	257	629	142,63
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah meter lari arsip yang dikelola	6	0	0	0	0,00	6	6	100,00
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00	41,78	20,00	6,70	33,50	20	68,48	68,48
2	18	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibeli	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	115	73	0	0	0,00	50	123	106,96
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	113	74	31	30	96,77	16	120	106,19
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Jasa Penunjang Urusan SKPD	100,00	59,28	20,00	19,85	99,25	20	99,13	99,13
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	16.945	6.664	2.988	2.943	98,49	3.187	12.794	75,50
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi/SDA dan listrik	72	44	12	12	100,00	12	68	94,44

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non ASN Yang Disediakan	57	39	16	16	100,00	17	72	126,32
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah	100,00	67,55	20	15	75,00	20	102,55	102,55
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan berizin	166	92	33	32	96,97	32	156	93,98
2	18	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan mebeleur	6	4	0	0	0,00	0	4	66,67
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	408	200	92	91	98,91	92	383	93,87
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasa bangunan gedung yang dipelihara	4.349,00	2.448,50	213,9	213,9	100,00	1.668,60	4.331,00	99,59
						Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	15	5	5	5	100,00	5	15	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
	URUSAN PENANAMAN MODAL									
2	18	02								
2	18	02	2	01						
2	18	02	2	01	01					
2	18	02	2	01	02					
2	18	02	2	02						

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	0					0	0	0,00
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	6	4	1	1	100,00	1	6	100,00
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	35.294	14.457	6.827	5.754	84,28	6.827	27.038	76,61
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor Yang Berkonsultasi Potensi Investasi	35.294	14.457	6.827	5.754	84,28	6.827	27.038	76,61
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional	7	5	1	1	100,00	2	8	114,29
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan	28.063	13.087	4.958	14.893	300,38	7.512	35.492	126,47
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	100,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83	99,83

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan						
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100					
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Berkas Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	28.063	13.087	4.958	14.893	300,38	7.512	35.492	126,47
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	28.063	13.087	4.958	14.893	300,38	4.993	32.973	117,50
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	60	50	10	10	100,00	10	70	116,67
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Yang Beroperasi	35.294	14.457	6.827	5.754	84,28	6.827	27.038	76,61
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berizin dan Beroperasi Sesuai Dengan Perizinan Yang Dimiliki	35.294	14.457	6.827	5.754	84,28	6.827	27.038	76,61
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	120	50	30	30	100,00	7	87	72,50

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	240	200	40	40	100,00	108	348	145,00
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	413	187	32	32	100,00	13	232	56,17
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Yang Terbangun	11	6	1	1	100,00	1	8	72,73
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten	11	6	1	1	100,00	1	8	72,73
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Buku Laporan Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai Investasi	503	256	63	63	100,00	54	373	74,16
						URUSAN PENANAMAN MODAL -									

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan			
					Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100		
	REVIU											
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00			10,00	10,00	100,00
2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	0			0	0	#DIV/0!
2	18	02	2	01	01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0			0	0	#DIV/0!
2	18	02	2	01	02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	0			0	0	#DIV/0!
2	18	02	2	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	1			1	1	100,00
2	18	02	2	02	01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	0			0	0	0,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1					1	1	100,00
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,49					3,49	3,49	100,00
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5					5	5	100,00
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	0					0	0	0,00
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	2					2	2	100,00
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,49					3,49	3,49	100,00
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	5.743					5.743	5.743	100,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RKPd Tahun 2020	Realisasi RKPd Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	5.743					5.743	5.743	100,00
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	22					22	22	100,00
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	0					0	0	#DIV/0!
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0					0	0	0,00
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	5.743					5.743	5.743	100,00
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	5.743					5.743	5.743	100,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
										Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	7					7	7	100,00
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	216					216	216	100,00
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13					13	13	100,00
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	83,00					83,00	83,00	100,00
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00					100,00	100,00	100,00
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	5					5	5	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan					
					Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100				
		URUSAN KETENAGAKERJAAN												
2	1	01	15		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja								
2	1	01	15	01	Penyebaran Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	15.600	5.100	600	203	33,83	750	6.053	38,80
2	1	01	15	03	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih/dibina	60	35	10	10	100,00	20	65	108,33
2	1	01	16		Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Persentase Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi								
	1	01	16	01	Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati	20	1	7	0	0,00	2	3	15,00
2	1	01	17		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
2	1	01	17	01	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	270	83	32	32	100,00	20	135	50,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
									Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	1	01	17	02	Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif	240	73	80	55	68,75	85	213	88,75
2	1	01	17	03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan	45	45	30	30	100,00	38	113	251,11
2	1	01	18		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
2	1	01	18	01	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak	300	169	100	100	100,00	100	369	123,00
2	1	01	18	02	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan	120	60	40	40	100,00	40	140	116,67
2	1	01	18	03	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun	30	20	5	2	40,00	5	27	90,00
2	1	01	19		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)								

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
									Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	1	01	19	01	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	6	0	1	1	100,00	0	1	16,67
2	1	01	19	02	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan	6	0	1	1	100,00	0	1	16,67
2	1	01	19	05	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	75	50	20	20	100,00	20	90	120,00
2	1	01	19	06	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan	75	50	20	25	125,00	20	95	126,67
2	1	01	19	07	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	6	2	0	0	#DIV/0!	0	2	33,33
2	1	01	19	08	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Las Listrik	Jumlah Bantuan Peralatan Las Listrik yang diberikan/dihibahkan	6	2	0	0	#DIV/0!	0	2	33,33

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
									Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	1	01	19	13	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	75	25	25	25	100,00	50	100	133,33
2	1	01	19	17	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	6	3	3	3	100,00	0	6	100,00
2	1	01	19	24	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	6	1	0	0	0,00	1	2	33,33
2	1	01	19	25	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif	Jumlah Bantuan Peralatan Otomotif yang diberikan/dihibahkan	6	1	0	0	0,00	0	1	16,67
2	1	01	19	27	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasn Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyuluhan Kerja	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	2.550	1.700	0	0	0,00	0	1.700	66,67
2	1	01	19	28	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja dan yang terdidik	90	40	40	40	100,00	40	120	133,33

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
									Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	1	01	19	31	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Bantuan Peralatan yang diberikan/dihibahkan	90	40	40	40	100,00	40	120	133,33
2	1	01	19	32	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	12	7	1	1	100,00	0	8	66,67
2	1	01	20		Program Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja								
2	1	01	20	01	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan	300	25	25	25	100,00	50	100	33,33
					URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU									
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	0,00					0,00	0,00	0,00
2	07	02	2	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0					0	0	0,00
2	07	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	0				0	0	0,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2 07 02 2 01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	0					0	0	0,00
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1,09					1,09	1,09	100,00
2 07 03 2 01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	78					78	78	100,00
2 07 03 2 01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	78					78	78	100,00
2 07 03 2 01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	0					0	0	0,00
2 07 03 2 01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	0					0	0	0,00
2 07 03 2 02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	80,00					80,00	80,00	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RPKD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RPKD Tahun 2020	Realisasi RPKD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6) * 100$	9	$10 = 5 + 7 + 9$	$11 = (10/4) * 100$
2 07 03 2 02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	38					38	38	100,00
2 07 03 2 03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	0					0	0	0,00
2 07 03 2 03 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	0					0	0	0,00
2 07 03 2 04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	2,50					2,50	2,50	100,00
2 07 03 2 04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	78					78	78	100,00
2 07 03 2 05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	0					0	0	0,00
2 07 03 2 05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0					0	0	0,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	07	04								
2	07	04								
2	07	04	2	01						
2	07	04	2	01	01					
2	07	04	2	01	02					
2	07	04	2	01	03					
2	07	04	2	01	04					
2	07	04	2	01	05					
2	07	04	2	02						
2	07	04	2	02	01					

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2 07 04 2 02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	0					0	0	0,00
2 07 04 2 03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	79,40					79,40	79,40	100,00
2 07 04 2 03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	0					0	0	0,00
2 07 04 2 03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	788					788	788	100,00
2 07 04 2 03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair	0					0	0	0,00
2 07 04 2 04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani	75,00					75,00	75,00	100,00
2 07 04 2 04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	60					60	60	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2 07 04 2 04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	0					0	0	0,00
2 07 04 2 04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	0					0	0	0,00
2 07 04 2 05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	0,00					0,00	0,00	0,00
2 07 04 2 05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	0					0	0	0,00
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00					100,00	100,00	100,00
2 07 05 2 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	23					23	23	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2 07 05 2 01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	18					18	18	100,00
2 07 05 2 01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	0					0	0	0,00
2 07 05 2 01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.502					4.502	4.502	100,00
2 07 05 2 02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	76,00					76,00	76,00	100,00
2 07 05 2 02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	5					5	5	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan				
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100			
2	07	05	2	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	0			0	0	0,00
2	07	05	2	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	0			0	0	0,00
2	07	05	2	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	20			20	20	100,00
2	07	05	2	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	0			0	0	0,00
3	32	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	78			78	78	100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) *}{100}$	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = $\frac{(10/4) *}{100}$
3 32 03 2 01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3					3	3	100,00
3 32 03 2 01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	2					2	2	100,00
3 32 03 2 01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	0					0	0	0,00
3 32 03 2 01 06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	0					0	0	0,00

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 4 angka (2) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 6 (tiga) Bidang, 18 (enam) Kepala Seksi, dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha; dan
 3. Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
 1. Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin;
 2. Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen; dan
 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga

Kerja.

- g. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Informasi Pasar Kerja.
- h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, membawahi :
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

KEPALA DINAS

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;

- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor,serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Dinas;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian,
- (2) Sub Bagian Program dan Perencanaan,sebagaimana
- (3) Sub Bagian Keuangan,

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,

pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.

(2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman modal;
- b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman modal;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dibantu oleh :

- (1) Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal,
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha,
- (3) Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal,

BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian penanaman modal.

(2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengendalian penanaman modal;
- b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang pengendalian penanaman modal;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang pengendalian penanaman modal;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dibantu oleh :

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal,
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal,
- (3) Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dibantu oleh :

- (1) Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin,
- (2) Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen,
- (3) Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan,

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan sistem informasi;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi dibantu oleh :

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja,
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga Kerja,

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh :

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- (2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- (3) Seksi Informasi Pasar Kerja,

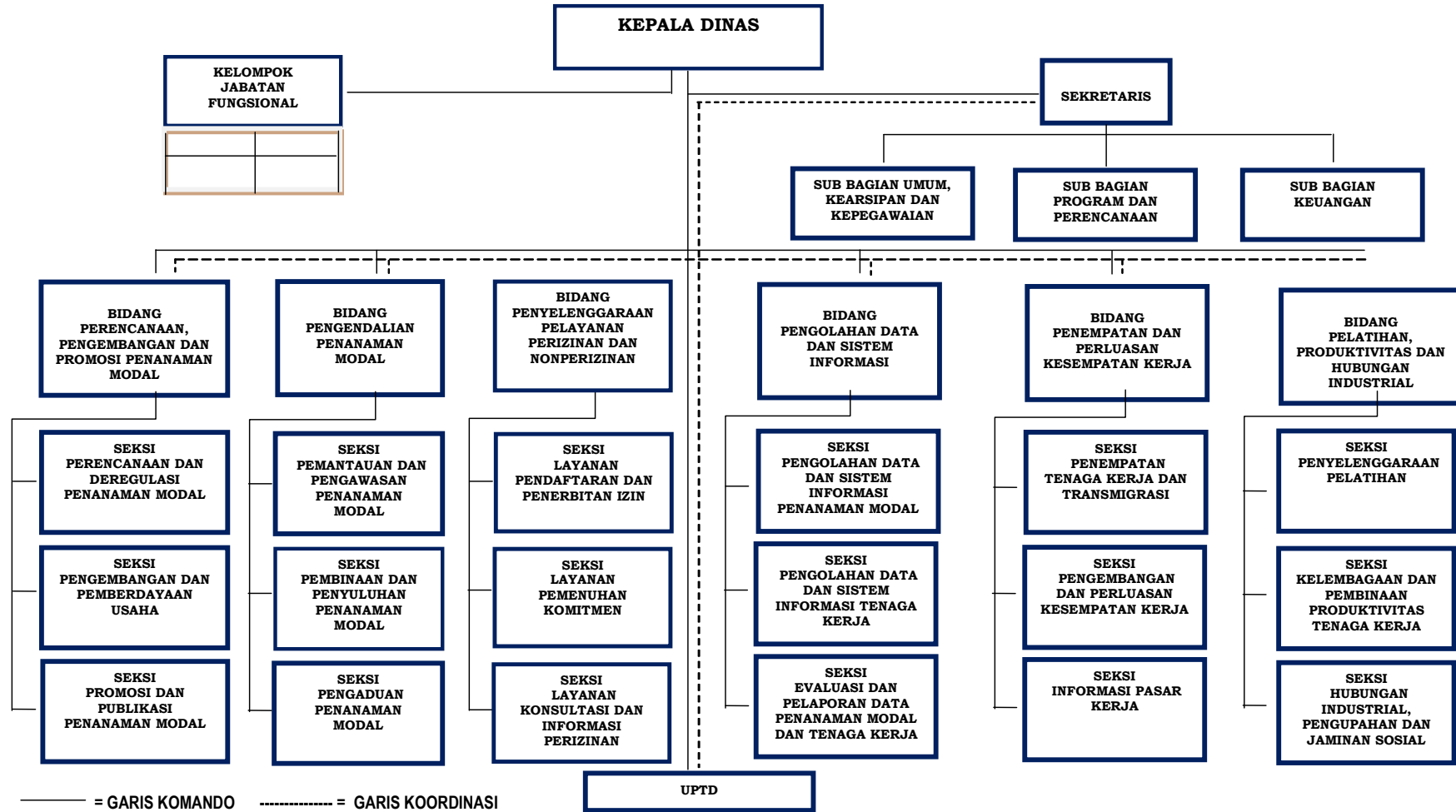
BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial dibantu oleh :

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan,
- (2) Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja,
- (3) Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial

**STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021 telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 13 (tiga belas) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon III-A
3. 6 (tiga) orang Kepala Bidang setara dengan eselon III-B
4. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, Subbag Program dan Perencanaan, dan Subbag Keuangan) setara dengan eselon IV-A
5. 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi setara dengan eselon IV-A

Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maupun yang berasal dari OPD lainnya.

2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut disajikan Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,00	20,00			33,41	20,00			
2	1801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,00	20,00			14,67	20,00			
2	1801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,00	20,00			20,00	20,00			
2	180120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	4			4	4			
2	180120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4	4			4	4			
2	180120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	4			4	4			
2	180120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4			4	4			
2	1801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,00	20,00			20,00	20,00			
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Keuangan Tepat Waktu											

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32	32			72	32			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			12	12			12	12			
2	1	0	2	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,00	20,00			4,00	20,00			
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0	1			0	1			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	54			0	54			
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3	3			3	3			
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	10			0	5			
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			20,00	20			17,14	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20	20			20	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34	34			34	34			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13	13			11	13			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						jumlah makan dan minum yang disediakan			220	245				245			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5	5			5	5			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			565	739			565	739			
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106	257			102	257			
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	6			0	6			
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20,00	20			6,70	20			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel			0	50			0	50			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31	16			30	16			
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,00	20			19,85	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.988	3.187			2.943	3.187			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12			12	12			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			16	17			16	17			
2	1	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20	20			15	20			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis	
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)		Tahun 2023 (tahun n+1)
1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33	32			32	32			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			92	92			91	92			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			213,9	1.668,60			213,9	1.668,60			
						Operasional UPTD			5	5			5	5			
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,00	20,00			20,00	20,00	
											20,00	20,00			20,00	20,00	
2	1	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14	14			13	13	
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	2			2	2	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4	4			4	4	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	12			12	12	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					72	72			72	72	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					12	12			12	12	
2	1	0	2	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					14	14			14	14	
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1	1			1	1	
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					72	72			72	72	
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2	2			2	2	
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5	5			5	5	
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					72	72			72	72	
2	1	0	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					7	7			7	7	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					24	26			24	26	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Bangunan Kantor	yang disediakan										
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			37	41			37	41		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan			14	16			14	16		
							jumlah makan dan minum yang disediakan			270	296			270	296		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			5	6			5	6		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan			7	8			7	8		
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			121	133			121	133		
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola			6	7			6	7		
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan			3	3			3	3		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan			1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan			55	61			55	61		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			18	19			18	19		
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan			3	3			3	3		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.187	3.506			3.187	3.506	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 153.257.114	Rp 168.582.825			Rp 153.257.114	Rp 168.582.825	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					78	78			78	78	
2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35	35			35	35	
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel					30	33			30	33	
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33	36			33	36	
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.668,60	1.835,46			1.668,60	1.835,46	
						Operasional UPTD					5	6			5	6	
						URUSAN PENANAMAN MODAL											
2	1	0	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Rp 465.381.741.065	Rp 481.620.593.307			Rp 1.948.131.251.836	Rp 481.620.593.307	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2	2			2	2			
2	1	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			2	2			2	2			
2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	3	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	3	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			0	0			0	0			
2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1	1			1	1			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			4.958	5.131			14.893	5.131			
2	1	0	2	0	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100,00	100,00			99,57	100,00			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			4.958	5.131			14.893	5.131			
2	1	0	2	0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			20	20			20	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			10	10			8	10			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			0	0			0	0			
2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			30	7			30	7			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			40	216			0	216			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			32	13			32	13			
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			1	1			1	1			
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	1			1	1			
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			63	63			56	63			
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					10,00	10,00			10,00	10,00	
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang					5	6			5	6	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
2	1	0	2	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					1	1			1	1	
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					5	6			5	6	
2	1	0	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					3	3			3	3	
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					2	2			2	2	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					1	1			1	1	
2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					3,55	3,61			3,55	3,61	
2	1	0	3	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					5	5			5	5	
2	1	0	3	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					1	1			1	1	
2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					4	4			4	4	
2	1	0				PROGRAM PELAYANAN					3,55	3,61			3,55	3,61	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	PENANAMAN MODAL					Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)											
2184201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan					5.958	6.173			5.958	6.173	
21842011	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif					5.958	6.173			5.958	6.173	
21842012	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha					22	24			22	24	
21842013	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti					10	11			10	11	
21842014	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					5	6			5	6	
2185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi					5.958	6.173			5.958	6.173	
2185201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan					5.958	6.173			5.958	6.173	
21852011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau					8	8			8	8	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					238	261			238	261	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					14	16			14	16	
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					85,00	87,00			85,00	87,00	
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,00	100,00			100,00	100,00	
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					5	5			5	5	
2	1	0	1	5		Program Peningkatan Kesempatan Kerja											
2	1	0	1	0	1	Penyebaran Informasi Pasar Kerja			600	750				203	750		

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
									Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	1	0	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih/dibina			10	20			10	20			
2	1	0	1	6	Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Persentase Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi											
	1	0	1	0	Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati			7	2			0	2			
2	1	0	1	7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja											
2	1	0	1	0	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan			32	20			32	20			
2	1	0	1	0	Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif			80	85			55	85			
2	1	0	1	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan			30	38			30	38			
2	1	0	1	8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
2	1	0	1	0	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak			100	100			100	100			

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
									Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	1	0	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan			40	40			40	40			
2	1	0	1	0	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun			5	5			2	5			
2	1	0	1		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)											
2	1	0	1	0	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			1	0			1	0			
2	1	0	1	0	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan			1	0			1	0			
2	1	0	1	0	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			20	20			20	20			
2	1	0	1	0	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan			20	20			25	20			
2	1	0	1	0	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	0			0	0			
2	1	0	1	0	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok	Jumlah Bantuan Peralatan Las Listrik yang			0	0			0	0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Masyarakat di Bidang Las Listrik	diberikan/dihibahkan											
2 1 0 1 1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			25	50			25	50			
2 1 0 1 1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			3	0			3	0			
2 1 0 1 2	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	1			0	1			
2 1 0 1 2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif	Jumlah Bantuan Peralatan Otomotif yang diberikan/dihibahkan			0	0			0	0			
2 1 0 1 2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasn Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyuluhan Kerja	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	0			0	0			
2 1 0 1 2	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Peserta Pelatihan yang terdidik			40	40			40	40			
2 1 0 1 3	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Bantuan Peralatan yang diberikan/dihibahkan			40	40			40	40			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)		Tahun 2023 (tahun n+1)
1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	0	1	3		Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun			1	0			1	0		
2	1	0	2			Program Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja										
2	1	0	2	0		Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan			25	50			25	50		
						URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU											
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan					82,00	82,50			82,00	82,50
2	0	0	2	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)					2	2			2	2
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro					1	1			1	1
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro					1	1			1	1
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja					3,85	4,94			3,85	4,94

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 3 2 0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat					81	85			81	85	
2 0 7 3 2 0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				Jumlah peserta yang dilatih					81	85			81	85	
2 0 7 3 2 0 1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					2	2			2	2	
2 0 7 3 2 0 1	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				Jumlah unit/paket sarana yang disediakan					5	6			5	6	
2 0 7 3 2 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi					80,00	85,00			80,00	85,00	
2 0 7 3 2 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta					40	42			40	42	
2 0 7 3 2 0 3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran					40	42			40	42	
2 0 7 3 2 0 3	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi				Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja					80	85			80	85	
2 0 7 3 2 0 4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil					3,00	3,50			3,00	3,50	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2070200	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan					80	82			80	82	
2070205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten					2,50	2,50			2,50	2,50	
20702051	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					82,50	85,00			82,50	85,00	
20704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan					74,91	75,51			74,91	75,51	
20704201	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja					40,66	41,26			40,66	41,26	
207042011	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja					20	20			20	20	
207042012	Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja					97,53	98,03			97,53	98,03	
207042013	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					40	44			40	44	
207042014	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani					10	11			10	11	
207042015	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar					750	825			750	825	
20704202	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta					0,60	1,20			0,60	1,20	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kabupaten/Kota											
						(LPTKS)											
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi					20,00	20,00			20,00	20,00	
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS					10	11			10	11	
2	0	0	2	0	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					80,00	80,60			80,00	80,60	
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					4	4			4	4	
2	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					788	827			788	827	
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja					50	55			50	55	
2	0	0	2	0	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					80,00	85,00			80,00	85,00	
2	0	0	2	0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					63	66			63	66	
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					20,00	20,00			20,00	20,00	
						Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					20,00	20,00			20,00	20,00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	2	0	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					20	22			20	22	
2	0	0	2	0		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya				80,00	82,50			80,00	82,50	
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja				5	5			5	5	
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan				100,00	100,00			100,00	100,00	
2	0	0	2	0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB				25	27			25	27	
2	0	0	2	0	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit				20	22			20	22	
2	0	0	2	0	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat				5	5			5	5	
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan				4.739	4.976			4.739	4.976	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
2	0 7 5	2	0 2				80,00	84,00			80,00	84,00	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											
2	0 7 5	2	0 2	0 1			5	5			5	5	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan											
2	0 7 5	2	0 2	0 2			0,75	1,35			0,75	1,35	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI											
2	0 7 5	2	0 2	0 3			21	22			21	22	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi											
		Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi											

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 5 2 0 0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									21	22			21	22	
2 0 7 5 2 0 0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									30,60	31,20			30,60	31,20	
3 3 2 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									80,00	82,50			80,00	82,50	
3 3 2 3	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									3	3			3	3	
3 3 2 3	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									4	6			4	6	
3 3 2 3	Penyuluhan Transmigrasi									2	3			2	3	
3 3 2 3	Pelatihan Transmigrasi									2	3			2	3	

2.3. *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*

Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka tugas pokok DPMPTSP&NAKER adalah ***Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.*** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP & NAKER mempunyai fungsi :

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Ketenagakerjaan timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.

- s. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya:
- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
 - b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
 - c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
 - d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
 - e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
 - f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
 - g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
 - h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
 - i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
 - j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
 - k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
 - l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
 - m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
 - n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS).
 - o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
 - p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
 - q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.

- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*

Rancangan awal RKPD tahun 2022 dibuat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2022 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2020 yang pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2020, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2022 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.009.726.340	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.009.726.340	
	BELANJA RUTIN				11.780.292.724					11.780.292.724	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00	11.780.292.724	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	20,00	11.780.292.724	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00		
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	114.559.968	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	114.559.968	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4	20.000.000	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2	10.000.000	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4	4.559.968	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4	4.559.968	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	80.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	80.000.000	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	9.263.115.260	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	9.263.115.260	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	72	9.253.115.260	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	72	9.253.115.260	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	10.000.000	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	14	194.435.680	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	14	194.435.680	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1	7.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1	7.000.000	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	72	141.403.680	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	72	141.403.680	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	2	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	2	15.000.000	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5	21.032.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5	21.032.000	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Junmlah peserta bimbingan teknis	72	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Junmlah peserta bimbingan teknis	72	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	7	645.355.189	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	7	645.355.189	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	24	17.900.043	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	24	17.900.043	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37	87.552.609	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37	87.552.609	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	14	182.639.781	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	14	182.639.781	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	270				jumlah makan dan minum yang disediakan	270		
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	19.196.246	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	19.196.246	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	7	100.261.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	7	100.261.400	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	121	151.051.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	121	151.051.300	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	jumlah arsip yang dikelola	6	86.753.810	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	jumlah arsip yang dikelola	6	86.753.810	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang yang diadakan	3	475.082.231	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang yang diadakan	3	475.082.231	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah mebel yang diadakan	55	138.076.488	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah mebel yang diadakan	55	138.076.488	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	16	87.005.743	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	16	87.005.743	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	3	570.448.254	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	3	570.448.254	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah jasa pengantar surat	3.187	3.929.485	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah jasa pengantar surat	3.187	3.929.485	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rp 153.257.114	289.568.713	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rp 153.257.114	289.568.713	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	78	276.950.056	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	78	276.950.056	
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	401.216.331	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	401.216.331	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	119.125.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	119.125.600	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Pemeliharaan Mebel	30	27.485.375	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Pemeliharaan Mebel	30	27.485.375	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	32.140.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	32.140.400	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1.668,60	222.464.956	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1.668,60	222.464.956	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.8	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	5	116.079.810	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	5	116.079.810	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.825.603.334	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.825.603.334	
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.825.603.334	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.825.603.334	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	259.571.286	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	259.571.286	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5	100.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5	100.000.000	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	50.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	50.000.000	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	5	50.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	5	50.000.000	
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	159.571.286	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	159.571.286	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya PERKADA RUPMD	2	50.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya PERKADA RUPMD	2	50.000.000	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1	109.571.286	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1	109.571.286	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,55	180.678.300	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,55	180.678.300	
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	180.678.300	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	180.678.300	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	1	55.684.200	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	1	55.684.200	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	4	124.994.100	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	4	124.994.100	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,55	1.076.826.078	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,55	1.076.826.078	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	5.958	1.076.826.078	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	5.958	1.076.826.078	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	5.958	1.000.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	5.958	1.000.000.000	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	22	45.480.728	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	22	45.480.728	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	10	6.345.350	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	10	6.345.350	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5	25.000.000	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	5.958	284.390.700	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	5.958	284.390.700	
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	5.958	284.390.700	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	5.958	284.390.700	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	8	55.684.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	8	55.684.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	238	124.994.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	238	124.994.100	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	14	103.712.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	14	103.712.400	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85,00	24.136.970	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85,00	24.136.970	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	24.136.970	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	24.136.970	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	5	24.136.970	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	5	24.136.970	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				15.403.830.283	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				15.403.830.283	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				15.403.830.283	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				15.403.830.283	
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	82,00	100.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	82,00	100.000.000	
I.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	100.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	100.000.000	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	50.000.000	
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	50.000.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	3,85	1.035.674.607	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	3,85	1.035.674.607	
II.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	81	815.620.288	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	81	815.620.288	
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah peserta yang dilatih	81	695.620.288	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah peserta yang dilatih	81	695.620.288	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	20.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	5	100.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	5	100.000.000	
II.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	80,00	60.026.866	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	80,00	60.026.866	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	40	60.026.866	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	40	60.026.866	
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	40	50.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	40	50.000.000	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	80,00	50.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	80,00	50.000.000	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	3,00	60.027.453	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	3,00	60.027.453	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	80	60.027.453	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	80	60.027.453	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	50.000.000	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	82,50	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	82,50	50.000.000	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,91	13.780.096.925	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,91	13.780.096.925	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	40,66	13.347.910.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	40,66	13.347.910.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	20,00	10.795.050.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	20,00	10.795.050.000	
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Persentase tingkat kesempatan kerja	97,53	10.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Persentase tingkat kesempatan kerja	97,53	10.000.000	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	40	20.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	40	20.000.000	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	10	20.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	10	20.000.000	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	750	2.502.860.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	750	2.502.860.000	
III.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	0,60	60.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	0,60	60.000.000	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	20,00	50.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	20,00	50.000.000	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10	10.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10	10.000.000	
III.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,00	251.249.922	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,00	251.249.922	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Updating sistem informasi Pasar Kerja	4	40.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Updating sistem informasi Pasar Kerja	4	40.000.000	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	788	86.249.922	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	788	86.249.922	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan peserta job fair	50	125.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan peserta job fair	50	125.000.000	
III.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	80,00	110.937.003	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	80,00	110.937.003	
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	63	40.937.003	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	63	40.937.003	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20,00	50.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20,00	50.000.000	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20	20.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20	20.000.000	
III.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	80,00	10.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	80,00	10.000.000	
III.5..1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	10.000.000	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	357.172.629	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	357.172.629	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	25	130.833.522	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	25	130.833.522	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	20	55.586.409	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	20	55.586.409	
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	5	20.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	5	20.000.000	
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.739	55.247.113	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.739	55.247.113	
IV.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	80,00	226.339.106	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	80,00	226.339.106	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	5	55.616.079	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	5	55.616.079	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	0,75	20.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	0,75	20.000.000	
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	21	20.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	21	20.000.000	
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah ketenagan bekerja	21	110.723.027	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah ketenagan bekerja	21	110.723.027	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	30,60	20.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	30,60	20.000.000	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	80,00	130.886.122	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	80,00	130.886.122	
V.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	130.886.122	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	130.886.122	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	4	60.886.122	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	4	60.886.122	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	2	20.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	2	20.000.000	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	2	50.000.000	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	2	50.000.000	
JUMLAH PAGU INDIKATIF					29.009.726.340	JUMLAH KEBUTUHAN DANA					29.009.726.340

2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Urusan Penanaman dan Ketenagakerjaan dalam katagori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPTSP & NAKER bersifat top down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C.32 berikut ini.

.Tabel T-C.32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BELANJA RUTIN				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	20,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	72	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	14	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	72	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	2	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Junmlah peserta bimbingan teknis	72	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	7	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	24	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	14	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	270	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	7	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	121	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	jumlah arsip yang dikelola	6	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang yang diadakan	3	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah mebel yang diadakan	55	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	18	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	3	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah jasa pengantar surat	3.187	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rp 153257114,00	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	78	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Pemeliharaan Mebel	30	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1.668,60	
A.8	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	5	
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya PERKADA RUPMD	2	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,55	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	1	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	4	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,55	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	5.958	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	5.958	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	22	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	10	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	5.958	
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	5.958	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	8	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	238	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	14	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85,00	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	82,00	
I.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	3,85	
II.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	81	
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah peserta yang dilatih	81	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	5	
II.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	80,00	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	40	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	40	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	80,00	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	3,00	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	80	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	82,50	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,91	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	40,66	
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	20,00	
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Persentase tingkat kesempatan kerja	97,53	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	40	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	10	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	750	
III.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	0,60	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	20,00	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10	
III.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,00	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Updating sistem informasi Pasar Kerja	4	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	788	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan peserta job fair	50	
III.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	80,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	63	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20,00	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20	
III.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	80,00	
III.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	
IV.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	25	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	20	
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	5	
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.739	
IV.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	80,00	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	5	
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	0,75	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	21	
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah ketenagan bekerja	21	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	30,60	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	80,00	
V.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	4	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	2	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	2	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP pada 2022 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara *year on year*.

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.

Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 *Major Project* yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 *Smelter*, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, *Food Estate*, Energi Terbarukan, *Major Project* di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan daya tarik Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan pelayanan penanaman modal
		1 Terwujudnya Iklim Penanaman Modal	1.1 Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
		2 Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Tepat Sasaran	2.1 Persentase Peningkatan Jumlah Investor
			2.2 Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi Investasi
		3 Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal	3.1 Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi
		4 Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Sesuai SOP dan SPP	4.1 Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5 Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Baik	5.1 Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatnya Kesempatan Berusaha
		1 Terciptanya Tenaga Kerja yang Berkopetensi	1.1 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja
			1.2 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan
		2 Terciptanya Hubungan Industrial yang kondusif	2.1 Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Ke Pengadilan H.I
		3 Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS, Bipatrit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3.1 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS, Bipatrit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks RB

3. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2022 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan

- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up

Rencana program dan kegiatan tahun 2022 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2022.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik..

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C. 33 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Sumenep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN			29.009.726.340				31.910.698.974	
	BELANJA RUTIN			11.780.292.724				12.958.321.996	
2	181 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00	11.780.292.724			20,00	12.958.321.996
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00				20,00	
2	18121 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		14	114.559.968			14	126.015.965
2	181211 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	4	20.000.000	APBD		4	22.000.000
2	181212 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	2	10.000.000	APBD		2	11.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	4	4.559.968	APBD		4	5.015.965
2	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sumenep	4	80.000.000	APBD		4	88.000.000
2	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		12	9.263.115.260			12	10.189.426.786
2	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Kab. Sumenep	72	9.253.115.260	APBD		72	10.178.426.786
2	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kab. Sumenep	12	10.000.000	APBD		12	11.000.000
2	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah		14	194.435.680			14	213.879.248
2	1	1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Kab. Sumenep	1	7.000.000	APBD		1	7.700.000
2	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Kab. Sumenep	72	141.403.680	APBD		72	155.544.048
2	1	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	Kab. Sumenep	2	15.000.000	APBD		2	16.500.000
2	1	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Kab. Sumenep	5	21.032.000	APBD		5	23.135.200

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Kab. Sumenep	72	10.000.000	APBD		72	11.000.000
2	1	8	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		7	645.355.189			7	709.890.708
2	1	8	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Kab. Sumenep	24	17.900.043	APBD		26	19.690.047
2	1	8	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sumenep	37	87.552.609	APBD		41	96.307.870
2	1	8	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Kab. Sumenep	14	182.639.781	APBD		15	200.903.759
								jumlah makan dan minum yang disediakan	Kab. Sumenep	270				297	
2	1	8	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Sumenep	5	19.196.246	APBD		6	21.115.871
2	1	8	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Sumenep	7	100.261.400	APBD		8	110.287.540
2	1	8	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Dalam dan Luar Daerah	121	151.051.300	APBD		133	166.156.430
2	1	8	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	Kab. Sumenep	6	86.753.810	APBD		7	95.429.191
2	1	8	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan		3	475.082.231			3	522.590.454

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Kab. Sumenep	1	250.000.000	APBD		1	275.000.000
2	1	8	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Sumenep	55	138.076.488	APBD		61	151.884.137
2	1	8	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Sumenep	18	87.005.743	APBD		20	95.706.318
2	1	8	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan		3	570.448.254			3	627.493.080
2	1	8	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	Kab. Sumenep	3.187	3.929.485	APBD		3.506	4.322.434
2	1	8	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Kab. Sumenep	Rp 153.257.114	289.568.713	APBD		Rp 168.582.825	318.525.585
2	1	8	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	Kab. Sumenep	78	276.950.056	APBD		78	304.645.062
2	1	8	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara		4	401.216.331			4	441.337.964
2	1	8	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	35	119.125.600	APBD		35	131.038.160
2	1	8	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	30	27.485.375	APBD		33	30.233.913

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sumenep	33	32.140.400	APBD		36	35.354.440
2	1	8	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kab. Sumenep	1.668,60	222.464.956	APBD		1.835,46	244.711.452
							Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	Kab. Sumenep	5	116.079.810	APBD		6	127.687.791
							URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.825.603.334				2.008.163.667
2	1	8	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		10,00	259.571.286			10,00	285.528.415
2	1	8	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		5	100.000.000			6	110.000.000
2	1	8	0	2	0	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	Kab. Sumenep	5	50.000.000	APBD		6	55.000.000
2	1	0	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha		3	159.571.286			3	175.528.415
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	Kab. Sumenep	2	50.000.000	APBD		2	55.000.000
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	Kab. Sumenep	1	109.571.286	APBD		1	120.528.415
2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		3,55	180.678.300			3,61	198.746.130
2	1	0	2	0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal		5	180.678.300			5	198.746.130
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	1	55.684.200	APBD		1	61.252.620
2	1	0	2	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	Kab. Sumenep	4	124.994.100	APBD		4	137.493.510
2	1	0	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)		3,55	1.076.826.078			3,61	1.184.508.685

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan		5.958	1.076.826.078			6.173	1.184.508.685
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	Kab. Sumenep	5.958	1.000.000.000	APBD		6.173	1.100.000.000
2	1	0	2	0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Kab. Sumenep	22	45.480.728	APBD		24	50.028.800
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Kab. Sumenep	10	6.345.350	APBD		11	6.979.885
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	5	25.000.000	APBD		6	27.500.000
2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi		5.958	284.390.700			6.173	312.829.770
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan		5.958	284.390.700			6.173	312.829.770
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Kab. Sumenep	8	55.684.200	DAK Non Fisik		8	61.252.620

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	238	124.994.100	DAK Non Fisik		261	137.493.510
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	14	103.712.400	DAK Non Fisik		16	114.083.640
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		85,00	24.136.970			87,00	26.550.667
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		100,00	24.136.970			100,00	26.550.667
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	Kab. Sumenep	5	24.136.970	APBD		5	26.550.667
						URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				15.403.830.283				16.944.213.311
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan		82,00	100.000.000			82,50	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	0	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)		2	100.000.000			2	110.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja		3,85	1.035.674.607			4,94	1.139.242.068
2	0	0	2	0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat		81	815.620.288			85	897.182.317
2	0	0	2	0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Kab. Sumenep	81	695.620.288	APBD		85	765.182.317
2	0	0	2	0	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	2	20.000.000	APBD		2	22.000.000
2	0	0	2	0	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	Kab. Sumenep	5	100.000.000	APBD		6	110.000.000
2	0	0	2	0	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi		80,00	60.026.866			85,00	66.029.553
2	0	0	2	0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Kab. Sumenep	40	60.026.866	APBD		42	66.029.553
2	0	0	2	0	3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran		40	50.000.000			42	55.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	80	50.000.000	APBD		85	55.000.000
2	0	0	2	0	4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil		3,00	60.027.453			3,50	66.030.198
2	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	Kab. Sumenep	80	60.027.453	APBD		82	66.030.198
2	0	0	2	0	5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten		2,50	50.000.000			2,50	55.000.000
2	0	0	2	0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	82,50	50.000.000	APBD		85,00	55.000.000
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		74,91	13.780.096.925			75,51	15.158.106.617
2	0	0	2	0	1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja		40,66	13.347.910.000			41,26	14.682.701.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	Kab. Sumenep	20	10.795.050.000	APBD		20	11.874.555.000
2	0	0	2	0	0	Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	Kab. Sumenep	97,53	10.000.000	APBD		98,03	11.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Sumenep	40	20.000.000	APBD		44	22.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	Kab. Sumenep	10	20.000.000	APBD		11	22.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Kab. Sumenep	750	2.502.860.000	APBD		825	2.753.146.000
2	0	0	2	0	2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		0,60	60.000.000			1,20	66.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	Kab. Sumenep	20,00	50.000.000	APBD		20,00	55.000.000
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	10	10.000.000	APBD		11	11.000.000
2	0	0	2	0	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		80,00	251.249.922			80,60	276.374.914
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	Kab. Sumenep	4	40.000.000	APBD		4	44.000.000
2	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	Kab. Sumenep	788	86.249.922	APBD		827	94.874.914
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair		50	125.000.000	APBD		55	137.500.000
2	0	0	2	0	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani		80,00	110.937.003			85,00	122.030.703
2	0	0	2	0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	Kab. Sumenep	63	40.937.003	APBD		66	45.030.703
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	20,00	50.000.000	APBD		20,00	55.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	Kab. Sumenep	20	20.000.000	APBD		22	22.000.000
2	0	0	2	0	5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya		80,00	10.000.000			82,50	11.000.000
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	Kab. Sumenep	5	10.000.000	APBD		5	11.000.000
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		100,00	357.172.629			100,00	392.889.891
2	0	0	2	0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB		25	130.833.522			27	143.916.875
2	0	0	2	0	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	Kab. Sumenep	20	55.586.409	APBD		22	61.145.050
2	0	0	2	0	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	Kab. Sumenep	5	20.000.000	APBD		5	22.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Kab. Sumenep	4.739	55.247.113	APBD		4.976	60.771.825
2	0	0	2	0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan		80,00	226.339.106			84,00	248.973.017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 0 7 5 2 0 2 0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	Kab. Sumenep	5	55.616.079	APBD		5	61.177.687
2 0 7 5 2 0 2 0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	Kab. Sumenep	0,75	20.000.000	APBD		1,35	22.000.000
2 0 7 5 2 0 2 0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	Kab. Sumenep	21	20.000.000	APBD		22	22.000.000
2 0 7 5 2 0 2 0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	Kab. Sumenep	21	110.723.027	APBD		22	121.795.330
2 0 7 5 2 0 2 0 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Kab. Sumenep	30,60	20.000.000	APBD		31,20	22.000.000
3 3 2 0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya		80,00	130.886.122			82,50	143.974.734
3 3 2 0 3 2 0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi		3	130.886.122			3	143.974.734

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	0	2	0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Kab. Sumenep	4	60.886.122	APBD		6	66.974.734
3	3	0	2	0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	2	20.000.000	APBD		3	22.000.000
3	3	0	2	0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	2	50.000.000	APBD		3	55.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2022 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2022.

Tabel 4.1
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				BELANJA RUTIN		11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	114.559.96 8	126.015.96 5	138.617.56 1	152.479.31 7	167.727.24 9	184.499.97 4
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4.559.968	5.015.965	5.517.561	6.069.317	6.676.249	7.343.874
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.00 0	117.128.00 0	128.840.80 0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	9.263.115. 260	10.189.426 .786	11.208.369 .465	12.329.206. 411	13.562.127 .053	14.918.339 .758
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	9.253.115.2 60	10.178.426. 786	11.196.269. 465	12.315.896. 411	13.547.486. 053	14.902.234. 658
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	194.435.680	213.879.248	235.267.173	258.793.890	284.673.279	313.140.607
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	7.000.000	7.700.000	8.470.000	9.317.000	10.248.700	11.273.570
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	141.403.680	155.544.048	171.098.453	188.208.298	207.029.128	227.732.041
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	24.157.650
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	21.032.000	23.135.200	25.448.720	27.993.592	30.792.951	33.872.246
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	645.355.189	709.890.708	780.879.779	858.967.757	944.864.532	1.039.350.985
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	17.900.043	19.690.047	21.659.052	23.824.957	26.207.453	28.828.198
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	87.552.609	96.307.870	105.938.657	116.532.523	128.185.775	141.004.352
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	182.639.781	200.903.759	220.994.135	243.093.549	267.402.903	294.143.194
					jumlah makan dan minum yang disediakan						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	19.196.246	21.115.871	23.227.458	25.550.203	28.105.224	30.915.746
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan	100.261.400	110.287.540	121.316.294	133.447.923	146.792.716	161.471.987

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					yang disediakan						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	151.051.30 0	166.156.43 0	182.772.07 3	201.049.28 0	221.154.20 8	243.269.62 9
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	86.753.810	95.429.191	104.972.11 0	115.469.32 1	127.016.25 3	139.717.87 9
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan	475.082.23 1	522.590.45 4	547.349.50 0	574.584.45 0	604.542.89 5	637.497.18 4
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	250.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	138.076.48 8	151.884.13 7	167.072.55 0	183.779.80 6	202.157.78 6	222.373.56 5
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	87.005.743	95.706.318	105.276.94 9	115.804.64 4	127.385.10 9	140.123.61 9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	570.448.25 4	627.493.08 0	690.242.38 8	759.266.62 7	835.193.28 9	918.712.61 8
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	3.929.485	4.322.434	4.754.677	5.230.145	5.753.159	6.328.475
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	289.568.71 3	318.525.58 5	350.378.14 3	385.415.95 8	423.957.55 3	466.353.30 9
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	276.950.05 6	304.645.06 2	335.109.56 8	368.620.52 5	405.482.57 7	446.030.83 5
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	401.216.33 1	441.337.96 4	485.471.76 1	534.018.93 7	587.420.83 0	646.162.91 3

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.125.600	131.038.160	144.141.976	158.556.174	174.411.791	191.852.970
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	27.485.375	30.233.913	33.257.304	36.583.034	40.241.338	44.265.471
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32.140.400	35.354.440	38.889.884	42.778.872	47.056.760	51.762.436
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	222.464.956	244.711.452	269.182.597	296.100.856	325.710.942	358.282.036
				Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	116.079.810	127.687.791	140.456.570	154.502.227	169.952.450	186.947.695
				URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU		1.436.742.027	1.908.163.667	2.098.980.034	2.308.878.037	2.539.765.841	2.793.742.425
Meningkatkan daya tarik Investaasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan pelayanan penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	259.571.286	285.528.415	314.081.256	345.489.382	380.038.320	418.042.152
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	159.571.286	175.528.415	193.081.256	212.389.382	233.628.320	256.991.152
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	109.571.286	120.528.415	132.581.256	145.839.382	160.423.320	176.465.652
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	124.994.100	137.493.510	151.242.861	166.367.147	183.003.862	201.304.248
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	687.964.771	1.084.508.685	1.192.959.554	1.312.255.509	1.443.481.060	1.587.829.166

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	687.964.771	1.084.508.685	1.192.959.554	1.312.255.509	1.443.481.060	1.587.829.166
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	611.138.693	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	45.480.728	50.028.800	55.031.680	60.534.848	66.588.333	73.247.167
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	6.345.350	6.979.885	7.677.874	8.445.661	9.290.227	10.219.250
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	40.262.750
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	284.390.700	312.829.770	344.112.747	378.524.022	416.376.424	458.014.066
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	284.390.700	312.829.770	344.112.747	378.524.022	416.376.424	458.014.066
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	124.994.10 0	137.493.51 0	151.242.86 1	166.367.14 7	183.003.86 2	201.304.24 8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.712.40 0	114.083.64 0	125.492.00 4	138.041.20 4	151.845.32 5	167.029.85 7
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU		15.403.830 .283	16.944.213 .311	18.638.634 .642	20.502.498. 106	22.552.747 .917	24.808.022 .708
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatnya Kesempatan Berusaha	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	100.000.00 0	110.000.00 0	121.000.00 0	133.100.00 0	146.410.00 0	161.051.00 0
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100.000.00 0	110.000.00 0	121.000.00 0	133.100.00 0	146.410.00 0	161.051.00 0
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1.035.674.607	1.139.242.068	1.253.166.275	1.378.482.902	1.516.331.192	1.667.964.311
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	815.620.288	897.182.317	986.900.549	1.085.590.603	1.194.149.664	1.313.564.630
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	695.620.288	765.182.317	841.700.549	925.870.603	1.018.457.664	1.120.303.430
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	13.780.096 .925	15.158.106 .617	16.673.917 .279	18.341.309.007	20.175.439 .908	22.192.983 .899
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja	13.347.910 .000	14.682.701 .000	16.150.971 .100	17.766.068.210	19.542.675 .031	21.496.942 .534
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	10.795.050.000	11.874.555.000	13.062.010.500	14.368.211.550	15.805.032.705	17.385.535.976
				Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	2.502.860.000	2.753.146.000	3.028.460.600	3.331.306.660	3.664.437.326	4.030.881.059
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000	96.630.600
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	251.249.92₂	276.374.91₄	304.012.40₅	334.413.64₆	367.855.01₁	404.640.51₂
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	64.420.400
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	86.249.922	94.874.914	104.362.40 ₅	114.798.64 ₆	126.278.51 ₁	138.906.36 ₂
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair	125.000.00 ₀	137.500.00 ₀	151.250.00 ₀	166.375.00 ₀	183.012.50 ₀	201.313.75 ₀
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani	110.937.00₃	122.030.70₃	134.233.77₄	147.657.15₁	162.422.86₆	178.665.15₃
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	40.937.003	45.030.703	49.533.774	54.487.151	59.935.866	65.929.453
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	357.172.62₉	392.889.89₁	432.178.88₁	475.396.76₉	522.936.44₅	575.230.09₀

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	130.833.522	143.916.875	158.308.562	174.139.418	191.553.360	210.708.696
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	55.586.409	61.145.050	67.259.555	73.985.511	81.384.062	89.522.468
				Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	55.247.113	60.771.825	66.849.007	73.533.908	80.887.298	88.976.028
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	226.339.106	248.973.017	273.870.318	301.257.350	331.383.085	364.521.394
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	55.616.079	61.177.687	67.295.456	74.025.001	81.427.502	89.570.252
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	110.723.027	121.795.330	133.974.863	147.372.349	162.109.584	178.320.542
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	130.886.122	143.974.734	158.372.208	174.209.429	191.630.371	210.793.409
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	130.886.122	143.974.734	158.372.208	174.209.429	191.630.371	210.793.409
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	60.886.122	66.974.734	73.672.208	81.039.429	89.143.371	98.057.709
				Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
JUMLAH						28.620.865.033	31.810.698.974	34.964.268.872	38.433.195.759	42.249.015.335	46.446.416.868

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

3. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sumenep, 06 Juni 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DIDIK WAHYUDI, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP.19670205 198812 1 001